

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MUARA ENIM (KOTA INDUK) DENGAN KOTA
PRABUMULIH (KOTA BARU)**



**Oleh:
ANNA YULIANITA
IMELDA**

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2011**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Judul Penelitian | : Analisis Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim (Kota Induk) dengan Kota Prabumulih (Kota Baru) |
| 2. Bidang Ilmu Penelitian | : Ekonomi Pembangunan |
| 3. Ketua Peneliti | |
| a. Nama Lengkap dan gelar | : Anna Yulianita, S.E, M.Si |
| b. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| c. NIP | : 197007162008012015 |
| d. Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli |
| e. Jabatan Struktural | : Penata Muda Tkt I |
| f. Bidang Keahlian | : Ekonomi Pembangunan |
| g. Fakultas / Jurusan | : Ekonomi / Ekonomi Pembangunan |
| h. Perguruan Tinggi | : Universitas Sriwijaya |
| i. Alamat | : Jln Raya Palembang – Prabumulih KM 32, Ogan Ilir 30662, Telepon 0711 581077, Fax 0711 580053 |
| 4. Nama Tim Peneliti | : Imelda, S.E, M.S.E |
| NIP | : 197703092009122002 |
| 5. Lokasi Penelitian | : Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim |
| 6. Mata Kuliah Yang Diampu | : Ekonomi Pembangunan |
| 7. Waktu Penelitian | : 3 (Tiga) Bulan |

**Inderalaya, Desember 2011
Ketua Peneliti,**

**Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya**

Dr. Azwardi, M.Si

Anna Yulianita, S.E, M.Si

NIP : 196805181993031003

NIP : 197007162008012015

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya**

**Prof H Syamsurijal AK, Ph.D
NIP : 195212121981021001**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Landasan Teori	4
2.1.1. Konsep Otonomi Daerah	4
2.1.2. Konsep Pembangunan Regional.....	6
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	7
2.1.4. Konsep Kemiskinan.....	8

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	11
3.2. Data dan Sumber Data.....	11
3.3. Teknik Analisis	11
3.4 Batasan Operasional Variabel	14
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN.....	15
4.1. Gambaran Umum	15
4.1.1. Gambaran Umum Kota Prabumulih.....	15
4.1.2. Kondisi Kependudukan	16
4.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Prabumulih	18
4.1.4. Fasilitas Publik Kota Prabumulih.....	23
4.1.5. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan	25
4.2. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim	27
4.2.1. Kondisi Kependudukan	28
4.2.2. Perekonomian Daerah Kabupaten Muara Enim	29
4.2.3. Angka Pengangguran dan Kemiskinan	37
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1. Kesimpulan	43
5.2. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini dibuktikan dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sejalan dengan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kewenangan dalam pengurusan daerah yang luas, memberikan peluang kepada daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan wilayah, pembinaan terhadap sosial ekonomi dan sumber daya yang intensif dan optimal serta diikuti penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Salah satu yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dalam menggerakkan perekonomian daerah adalah dengan jalan mengelola serta mengembangkan pembangunan di wilayahnya sendiri, salah satunya pemekaran kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 oleh pemerintah pusat mengenai pemekaran wilayah termasuk persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pemekaran wilayah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Kecenderungan laju pemekaran daerah saat ini perlu dukungan sistem kendali yang andal karena dikawatirkan dapat menjadi faktor pemicu disintegrasi. Pemekaran daerah dalam kerangka konsep otonomi tidak dapat dilepaskan dari esensi dan prinsip desentralisasi. Menurut Simon (1996), prinsip desentralisasi mensyaratkan adanya dukungan pembiayaan yang lebih besar dibanding sistem sentralisasi. Di samping itu, dalam sistem desentralisasi diperlukan sistem kendali dari pemerintah pusat yang dilakukan secara ketat. Dwiyanto (2003) menjelaskan berbagai kelemahan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berdasarkan hasil observasi pada awal implementasinya di Indonesia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemekaran daerah akan menghadapi masalah bagaimana menetapkan garis batas antar dua sistem wilayah. Menurut Haggett (2001) batas territory antar Negara di dunia dapat merupakan garis batas daerah aliran sungai (DAS), garis median yang membagi permukaan sungai dan danau maupun laut dan, dapat merupakan garis semu berdasarkan koordinat lintang dan bujur.

Salah satu kabupaten/kota baru yang merupakan pemekaran dari kabupaten Muara Enim adalah Kota Prabumulih. Sebagai daerah otonom yang relatif baru dimana Prabumulih ini merupakan kota baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001. dengan terbentuknya Kota Prabumulih diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menggali dan mengembangkan segala aspek yang berpotensi guna menunjang laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan pertimbangan pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di Kota Prabumulih yang diperkuat dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kinerja ekonomi yang terjadi di Kota Prabumulih sesudah pemekaran ?
- b. Bagaimana perbandingan kinerja ekonomi daerah Prabumulih setelah dilakukan pemekaran dengan Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Induk ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Ingin menganalisis kinerja ekonomi yang terjadi di Kota Prabumulih sesudah pemekaran.
- b. Ingin menganalisis perbandingan kinerja ekonomi Kota Prabumulih setelah dilakukan pemekaran dengan Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Induk.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan mengevaluasi pemekaran daerah dengan menggunakan perhitungan Indeks Kinerja Ekonomi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan (United Nations Development Programme) UNDP (Juli 2008) dengan menggunakan beberapa indikator.

1.4.2. Manfaat Operasional

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung aspek-aspek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan per kapita sebagai unsur-unsur yang penting dalam menilai kinerja perekonomian daerah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah.

Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia.

Sejak Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, telah terbentuk 363 Kabupaten dan 93 Kota dan 33 Provinsi (Tidak termasuk 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten). Hasil Evaluasi awal

terhadap beberapa daerah Otonom Baru, hanya sebagian kecil daerah yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagian daerah Otonom baru lainnya masih menghadapi permasalahan mendasar seperti : keterbatasan pembiayaan, penetapan batasan wilayah, Rencana Tata Ruang, penyerahan asset dan kedudukan ibukota.

Implikasi dari pemekaran wilayah antara lain menimbulkan konsekuensi negatif, yaitu terjadinya inefisiensi administrasi karena biaya penyelenggaraan pemerintahan meningkat luar biasa, kemerosotan kapasitas penyelenggaraan fungsi-fungsi dasar yang menjadi kewajiban semua kabupaten/kota, peningkatan parokialisme dan potensi konflik antar kelompok (etnik agama) yang dimanipulasi oleh elit tradisional lokal.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun oleh Departemen Dalam Negeri, animo masyarakat (kelompok tertentu) untuk membentuk daerah otonom baru relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data usulan pembentukan daerah otonom hingga saat ini (Januari 2007) sebanyak 21 usulan pembentukan Provinsi dan 110 usulan pembentukan Kabupaten/ Kota. Dari jumlah tersebut terdapat 16 calon Kabupaten/ Kota yang sudah dibahas dalam sidang DPOD, dan selebihnya ditunda pembahasannya menunggu penyelesaian PP Pengganti PP 129 tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan daerah. Kelemahan mendasar dari PP ini adalah menggunakan "*sistem agregat*" (tanpa ada komponen yang mempunyai bobot tertentu baik bobot teknis maupun bobot administratif) dalam menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah dapat dihapuskan dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut penyempurnaan PP nomor 129 tahun 2000, maka pemerintah mengeluarkan PP nomor 78 tahun 2007. Terdapat beberapa perubahan dalam komponen indikator penentu layak tidaknya suatu daerah untuk dimekarkan antara PP nomor 129 tahun 2000 dengan PP nomor 78 tahun 2007. Aspek-aspek

yang dipersyaratkan oleh PP nomor 129 tahun 2000, yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan variabel lain, sedangkan PP nomor 78 tahun 2007, yang meliputi: kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali

Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur. Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. Perubahan-perubahan tersebut, meski secara de jure telah diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak semudah membalikkan tangan, lepasnya daerah baru dari daerah lama, berarti pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan penerimaan dan pendapatan, disamping satu hal yang sudah pasti adalah berkurangnya luas wilayah. Hal ini apabila tidak diperhatikan secara seksama dalam proses pembentukan daerah otonom baru berpotensi akan memicu konflik lintas daerah, sehingga menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah

2.1.2. Konsep Pembangunan Regional

Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi serta perubahan status kerja buruh karena itu konsep pembangunan regional sangat tepat bila didukung dengan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999:107) daerah mempunyai 3 pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budayanya, geografis, dan sebagainya, daerah ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain: 1) sumber daya alam yang tersedia, 2) tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam, 3) adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi, komunikasi, 4) tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, dan 5) tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi.

Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya. Jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat.

Menurut pandangan Adam Smith bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Sukirno (1985: 19) menyebutkan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat perekonomian lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya dengan kata lain perkembangan akan tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Todaro (2000 : 111) menyatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, pertama : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, kedua; pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendiri membawa pertumbuhan angkatan kerja, ketiga; kemajuan teknologi.

2.1.4. Konsep Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat diukur secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada tingkat minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk tidak disebut miskin. Sedangkan kemiskinan relatif mengacu pada distribusi pendapatan.

Fenomena kemiskinan dalam masyarakat dapat dipandang dari beberapa aspek penyebabnya, di antaranya: a) kemiskinan berhubungan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, sering disebut kemiskinan kultural. Dalam konteks ini kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja. b) Kemiskinan timbul sebagai akibat adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat. Golongan yang memiliki akses kuat terhadap faktor-faktor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang kemudian menyisihkan golongan masyarakat pinggiran (peripheral). Akibatnya muncul

kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. c) Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurangberuntungan (*disadvantages*), yaitu fisik yang lemah, kerentanan (*vulnerability*), keterisolasian, serta ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan apakah penduduk tergolong miskin atau tidak (garis kemiskinan/*poverty line*), di antaranya menggunakan indikator pengeluaran rata-rata per bulan yang mencukupi konsumsi makanan setara kalori tertentu per kapita, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pada dasarnya perspektif kemiskinan sangat luas, tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga meliputi dimensi sosio-kultural. Pada umumnya kemiskinan bergandengan erat dengan pengangguran dan pemukiman kumuh dan lingkungan yang tidak sehat. Karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki, baik skill, pendidikan maupun faktor produksi, kelompok ini kalah bersaing dalam memperebutkan pasar kerja, akibatnya banyak di antara mereka yang menjadi pengangguran. Karena pendapatan yang relatif rendah, menyebabkan berbagai kebutuhan yang paling pokok tidak bisa dipenuhi, seperti air bersih, fasilitas mandi cuci kakus yang sehat, fasilitas kesehatan dan lain-lain.

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan *ekstrim* (*extreme poverty*) atau kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Penggolongan tipe kemiskinan lainnya adalah kemiskinan persisten, yaitu situasi di mana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Di Amerika, yang dimaksud dengan kelompok miskin persisten adalah mereka yang telah menerima tunjangan kesejahteraan selama lebih dari 8 tahun (Berrick, 1995; Pandji, 2001). Sedangkan kemiskinan transien adalah situasi di mana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji, 2001). Kondisi kemiskinan transien ini dapat ditemui pada saat suatu negara dilanda krisis ekonomi atau bencana alam. Tinjauan lain mengenai kemiskinan adalah garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin. Garis kemiskinan biasanya dihubungkan dengan standar hidup, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (barang dan jasa). Namun konsep ini masih terus diperdebatkan, khususnya dalam menentukan keluarga atau masyarakat yang perlu ditolong melalui program penanggulangan kemiskinan.

Selama ini data kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kebutuhan dasar atau konsumsi keluarga untuk kemiskinan dan dikonversikan ke dalam rupiah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonversikan ukuran kemiskinan ke dalam 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kekurangan pakaian, rumah tinggal, kesehatan, pendidikan, bahan bakar dan keperluan transportasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ekonomi pembangunan dan keuangan daerah yang membahas mengenai masalah yang berhubungan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim (Kota Induk) dengan Kota Prabumulih (Kota Baru). Periode waktu penelitian dalam 11 tahun terakhir yaitu 2000 sampai 2010.

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dipergunakan diperoleh dari berbagai institusi terkait yang diakui secara sah atau legal untuk menerbitkan data yang diperlukan oleh masyarakat umum, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, dan Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih. Selain itu data juga diperoleh melalui studi pustaka dari beberapa literatur berupa buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3. Teknik Analisis

Kinerja Ekonomi Daerah

Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru, yang pada gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini harus dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi, juga kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada pembanding yang setara. Oleh sebab itu dilakukan pula perbandingan antara daerah yang mekar dan daerah yang tidak melakukan pemekaran (prinsip treatment-control). Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dan DOB sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOB, daerah induk, maupun daerah sekitarnya.

Untuk melihat kondisi atau dampak dari pemekaran daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan (*United Nations Development Programme*) UNDP (Juli 2008) melakukan penelitian dan salah satunya melihat dari kinerja perekonomian daerah. Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah :

(1) Pertumbuhan PDRB Non-migas (LPE)

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.

(2) PDRB per Kapita (Kap)

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

(3) Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi (R/N)

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

(4) Angka Kemiskinan (PM)

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk. Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten i di tahun t , indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{IKE}_{i,t} = \frac{(\mathbf{LPE}_{i,t} + \mathbf{R/N}_{i,t} + \mathbf{KAP}_{i,t} + \mathbf{PM}_{i,t})}{4}$$

Teknik analisis ini untuk melihat konsep dan evaluasi dampak dari pemekaran daerah Kabupaten/Kota, dan adapun definisi evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standard. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri, yang tertuang dalam PP 129/2000. Dalam Bab II pasal 2 disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

3.4. Batasan Operasional Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam periode satu tahun.
2. Kinerja dapat diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dan komponen kemampuan (*ability*), dukungan (*support*), dan usaha (*effort*), untuk mengukur sebagian besar kinerja aparatur pemerintah daerah yang dapat diukur dengan kriteria efektifitas dan efisiensi. Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak dengan menggunakan beberapa indikator Pertumbuhan PDRB Non-migas, PDRB per Kapita, Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi, dan Angka Kemiskinan.
3. Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan dalam Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan atas dasar harga konstan tanpa melihat kenaikan itu besar atau kecil yang berasal dari pertumbuhan penduduk atau juga perubahan dari struktur ekonomi yang baru.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.
5. Kemiskinan secara konseptual dapat diukur secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada tingkat minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk tidak disebut miskin. Sedangkan kemiskinan relatif mengacu pada distribusi pendapatan.

IV. GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Gambaran Umum Kota Prabumulih

Kota Prabumulih sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim dengan jarak lebih kurang 87 Km ke ibukota Muara Enim dan 97 Km ke ibukota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang). Prabumulih ditingkatkan statusnya sehingga menjadi Kota Administratif Prabumulih berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1982 dengan luas wilayah 434,50 km² meliputi :

1. Kecamatan Prabumulih Barat yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 1 Desa.
2. Kecamatan Prabumulih Timur yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 1 Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2001 tentang pembentukan dua Kecamatan baru yaitu Kecamatan Cambai meliputi 7 Desa dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah meliputi 5 Desa dan masuk dalam wilayah Kota Administratif Prabumulih, sehingga administratif Pemerintah Kota Prabumulih terdiri dari 4 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 14 Desa dan Undang-undang No. 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi Kota Prabumulih. Kota Prabumulih terletak pada posisi antara 3° – 4° Lintang Selatan dan 104° – 106° Bujur Timur. Tahun 2007 Kota Prabumulih terbentuk berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007 terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah terdiri dari 9 desa/kelurahan
2. Kecamatan Prabumulih Timur terdiri dari 8 desa/kelurahan
3. Kecamatan Prabumulih Selatan terdiri dari 4 desa/kelurahan
4. Kecamatan Prabumulih Barat terdiri dari 6 desa/kelurahan
5. Kecamatan Prabumulih Utara terdiri dari 5 desa/kelurahan
6. Kecamatan Cambai terdiri dari 5 desa/kelurahan

Jadi jumlah desa seluruhnya sebanyak 37 desa/kelurahan.

4.1.2. Kondisi Kependudukan

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Prabumulih mencapai 137.786 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 317 jiwa per kilometer persegi, dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Prabumulih Barat yang mencapai 242 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Prabumulih Utara 150 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan 63 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Prabumulih terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 1998 sampai dengan 2009. Hal ini tampak terlihat pada tahun 2002 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 3,91 persen. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya pemekaran wilayah, dimana Kota Prabumulih dipisahkan dari Kabupaten Muara Enim semenjak tahun 2001 sehingga menarik minat penduduk asli yang awalnya berada di luar daeah kini bertransmigrasi kembali ke kotanya karena adanya perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Prabumulih yang membutuhkan potensi-potensi sumber daya manusia yang berkualitas, dan juga disebabkan tingkat angka kelahiran penduduk yang relatif tinggi di Kota Prabumulih. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang stabil yaitu 2,58%. Pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan yang rendah yaitu 0,52%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 1,85%. Kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2009 yaitu 1,13%. (Tabel 4.1)

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun di Kota Prabumulih Tahun 1998 -2009

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1999	116.066	-
2000	119.063	2,58
2001	122.138	2,58
2002	125.292	2,58
2003	128.572	2,62

2004	129.667	0,85
2005	130.340	0,52
2006	132.752	1,85
2007	134.686	1,46
2008	136.253	1,16
2009	137.789	1,13

Berdasarkan Tabel 4.2, jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha terjadi peningkatan yang cukup tinggi, terlihat pada tahun 2000 jumlah penduduk yang terdaftar di Kota Prabumulih sebesar 38.214 orang dan meningkat pada tahun 2009 sebesar 57.394 orang. Sebelum pemekaran wilayah pada tahun 2000 jenis usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sebesar 50,13 persen atau 19.158 orang tenaga kerja. Diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa, masing-masing sebanyak 6.506 orang tenaga kerja atau 17,03 persen dan 3.503 tenaga kerja atau sebesar 9,17 persen.

Hal ini berarti ketiga jenis lapangan usaha tersebut menyerap 76,33 persen tenaga kerja yang ada di kota Prabumulih. Setelah pemekaran wilayah pada tahun 2009 penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh ketiga sektor lapangan usaha sebelum terjadinya pemekaran wilayah, dimana sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 38,71 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,35 persen dan diikuti oleh sektor lainnya sebesar 19,19 persen. Ini berarti ketiga jenis lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 82,25 persen.

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2000 (Sebelum Pemekaran Wilayah)		2009 (Setelah Pemekaran Wilayah)	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pertanian	19.158	50,13	22.195	38,71
Industri Pengolahan	3.023	7,91	1.870	3,26
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	3.104	8,12	13.963	24,35
Jasa Kemasyarakatan	3.503	9,17	8.306	14,49

Lainnya (Pertambangan dan Penggalan, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	5.943	2,52	11.000	19,19
PDRB	38.214	100	57.394	100

Sumber Data : BPS, PDRB Kota Prabumulih

4.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Prabumulih

Dilihat dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Prabumulih pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan. maka untuk sektor pertambangan dan penggalan secara persentase cenderung mengalami penurunan. Sementara sumbangan sektor pertanian relatif stabil. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalan ke sektor-sektor lainnya yaitu ke sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kontribusi pertanian relatif kecil terhadap PDRB bertolak belakang dengan serapan tenaga kerja di sektor ini yang relatif tinggi. Sementara itu sektor pertambangan yang memiliki andil yang besar terhadap PDRB menyerap tenaga kerja yang relatif kecil, hal ini disebabkan sifat sektor pertambangan yang cenderung *capital intensive*. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan menimbulkan disparitas pendapatan antar sektor.

Tabel 4.3.
PDRB Kota Prabumulih
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2000 – 2009

No	Sektor	2000	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	92.874	17.056	110.697	114.653	119.052	121.789
2	Pertambangan&Penggalian	363.292	380.009	380.235	376.517	384.051	385.133
3	Industri Pengolahan	54.683	69.875	73.497	77.137	80.527	82.991
4	Listrik, Gas dan Air	2.292	2.600	2.693	2.750	2.805	2.916
5	Bangunan	82.499	114.428	122.782	131.872	143.823	155.086
6	Perdagangan, Hotel & Rest	163.362	311.003	233.579	253.238	269.945	282.819
7	Pengangkutan&Komunikasi	24.497	33.100	35.736	38.963	42.615	46.395
8	Bank dan Keuangan	72.276	96.172	105.583	118.996	129.101	140.273
9	Jasa-jasa	65.752	83.073	88.765	94.153	100.163	109.115
PDRB Dengan Migas		921.527	1.103.392	1.153.568	1.208.279	1.272.082	1.326.517
PDRB Non Migas		561.323	727.350	777.880	836.760	892.761	946.218

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dalam menilai gambaran dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung merupakan gambaran dari tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Bagi daerah indikator ini akan menjadi pegangan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dari pembangunan yang telah dicapai dan untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun tercermin dari data PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila pertumbuhan negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian.

Secara sektoral, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Prabumulih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan kota Prabumulih sebelum pemekaran dimana pertumbuhan ekonomi kota Prabumulih pada tahun 1998 dalam struktur dengan migas negatif 6,96 persen. Setelah itu laju pertumbuhan merambat naik dengan 4,51 persen pada tahun 1999 dan meningkat pada tahun 2000 menjadi 7,08 persen. Hal ini terlihat dari laju

pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dari 7,05 persen pada tahun 1999 menjadi 12,68 persen pada tahun 2000. Laju pertumbuhan industri pengolahan tumbuh dari 5,40 persen menjadi 6,08 persen diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih dari 5,01 persen menjadi 8,67 persen. Setelah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, laju pertumbuhan Kota Prabumulih pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sebanyak dua kali pada tahun tersebut, namun dengan stabilnya harga BBM pada tahun 2007 pertumbuhan Kota Prabumulih meningkat kembali sebesar 4,74 persen. Sampai dengan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 5,32. Namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,24 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,28 persen, sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 2,00 persen. Diikuti pula oleh penurunan lima sektor lainnya yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran serta Sektor Pengangkutan dan komunikasi. Hanya tiga sektor yang masih mengalami peningkatan pada laju pertumbuhannya yaitu Sektor Listrik, gas dan air minum, Sektor bank dan keuangan serta Sektor jasa-jasa. Tetapi dilihat dari nilai PDRB masih tetap menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 tersebut.

Tabel 4.4.
Tingkat Pertumbuhan PDRB Kota Prabumulih
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2001 – 2009

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	2.96	1.91	2.98	3.06	3.52	3.40	3,57	3,84	2,30
2	Pertambangan&Penggalian	-0.87	2.04	3.19	0.97	-0.75	0.06	-0,98	2,00	0,28
3	Industri Pengolahan	3.29	4.85	5.25	5.81	5.94	5.18	4,95	4,39	3,06
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.39	1.92	2.60	3.10	3.77	3.58	2,12	2,00	3,96
5	Bangunan	4.36	6.07	6.99	8.16	8.28	7.30	7,40	9,06	7,83
6	Perdagangan, Hotel & Rest	3.61	4.98	6.06	7.10	7.55	7.60	8,42	6,60	4,77
7	Pengangkutan&Komunikasi	3.90	5.21	5.60	7.07	9.33	7.96	9,03	9,37	8,87
8	Bank dan Keuangan	3.73	5.27	5.49	6.78	8.19	9.79	12,70	8,49	8,65
9	Jasa-jasa	2.67	4.93	5.59	4.62	6.17	6.85	6,07	6,83	8,48

PDRB DENGAN MIGAS	1.77	3.65	4.60	4.22	4.12	4.55	4,74	5,32	4,24
PDRB TANPA MIGAS	3.49	4.65	5.46	6.15	6.88	6.95	7.57	6.74	5.94

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih, data diolah

Jika dilihat struktur ekonomi Kota Prabumulih sebelum pemekaran wilayah selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami perubahan, mengarah pada semakin kokohnya dominasi sektor pertambangan. Hal ini ditandai oleh peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku yang semakin meningkat. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi hampir sama dengan sektor pertambangan dan penggalian sebelum masa krisis, yaitu sebesar 23,3 persen. Setelah krisis kontribusinya secara berfluktuasi cenderung mengecil hingga menjadi 21,17 persen pada tahun 2000. Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB, dengan kontribusi sekitar 18,7 persen sebelum masa krisis dan dalam perkembangannya terus menurun hingga 12,47 persen pada tahun 2000.

Setelah pemekaran wilayah, struktur perekonomian Kota Prabumulih masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian pada Tabel 4.4. yang menjadi penyumbang terbesar pada tahun 2009 yaitu sebesar 29,03 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya potensi sumber daya alam berupa migas yang dimiliki kota Prabumulih. Sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,32 persen pada tahun 2009.

Tabel 4.5.
Distribusi Persentase PDRB Kota Prabumulih
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2000 – 2009

Sektor	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	8,42	9,28	9,16	9,01	8,97	9,18
Pertambangan & Penggalian	32,93	32,94	31,47	29,59	28,95	29,03
Industri Pengolahan	4,96	6,06	6,08	6,06	6,07	6,26

Listrik, Gas dan Air Bersih	0,21	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22
Bangunan	7,48	9,92	10,16	10,36	10,84	11,69
Perdagangan, Hotel & Rest	14,81	26,96	19,33	19,90	20,35	21,32
Pengangkutan & Komunikasi	2,22	2,87	2,96	3,06	3,21	3,50
Bank dan Keuangan	6,55	8,34	8,74	9,35	9,73	10,57
Jasa-jasa	5,96	7,20	7,35	7,40	7,55	8,23
PDRB Dengan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih, data diolah

Kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian kota Prabumulih diberikan oleh sektor bangunan sebesar 11,69 persen pada tahun 2009. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil hingga mencapai nilai di bawah 1 persen adalah sektor listrik, gas, dan air bersih.

Pergeseran kontribusi ini merupakan salah satu kemajuan positif untuk perkembangan perekonomian daerah perkotaan. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat sudah cukup stabil dan kuat untuk mendorong tahap perkembangan ekonomi selanjutnya.

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor bangunan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan mendorong tercapainya salah satu tujuan proses pembangunan yaitu perekonomian berbasis industri dan jasa terutama untuk daerah perkotaan.

Pendapatan perkapita mencerminkan secara umum pendapatan setiap penduduk dan lazim digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pendapatan per kapita Kota Prabumulih terus meningkat. Hal ini terjadi baik dari sektor migas maupun sektor non migas setelah pemekaran wilayah terlihat pada Tabel 2.6. Dengan migas pada tahun 2000 sebesar Rp. 7.739.827,00 menjadi Rp. 18.824.750,00 pada tahun 2009. Demikian pula pendapatan per per kapita tanpa migas pada tahun 2000 sebesar Rp 4.714.504,00 menjadi Rp. 6.867.301,00.

Tabel 4.6.
PDRB Per Kapita Kota Prabumulih
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2000 – 2009 (Dengan Migas dan Tanpa Migas)

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dengan Migas	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
2000	7.739.827	4.714.504
2001	7.678.625	4.756.307
2002	7.758.527	4.852.252
2003	8.058.928	5.081.453
2004	8.172.484	5.248.479
2005	12.584.280	5.597.325
2006	13.821.364	5.859.646
2007	15.623.665	6.212.672
2008	18.448.188	6.555.320
2009	18.824.750	6.867.301

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih, data diolah

4.1.4. Fasilitas Publik Kota Prabumulih

Seiring dengan pembagian wilayah dalam rangka pembentukan daerah otonom di Indonesia telah lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan fenomena yang berkembang, sejak berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah yang luas maka lahirlah kebijakan-kebijakan dan wacana untuk melakukan pemekaran wilayah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.

Suatu daerah otonom dapat dibentuk dengan memperhatikan kriteria-kriteria potensi daerah yang dimilikinya dengan dilihat adanya ketersediaan sarana dan

prasarana infrastruktur yang menunjang di daerahnya, seperti sarana ekonomi, sarana pendidikan, lembaga keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi serta pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Hal ini terbukti dengan adanya kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di daerah tersebut sangat diperlukan guna menunjang dan meningkatkan kemakmuran di daerahnya.

Sebelum terjadinya pemekaran wilayah pada tahun 2000 fasilitas pendidikan di kota Prabumulih tercatat 67 unit Sekolah Dasar, 13 unit SLTP, dan 12 unit SMU, dan terjadi peningkatan pada tahun 2007 setelah pemekaran wilayah yaitu terdapat 92 unit sekolah dasar, 18 unit SLTP, dan 15 unit SMU. Begitu pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan Kota Prabumulih yang meningkat dari 55 unit fasilitas kesehatan menjadi 65 unit setelah pemekaran wilayah. Selain fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah Kota Prabumulih terdapat juga fasilitas lain yang semakin meningkat, diharapkan dapat mendukung upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berpotensi di Kota Prabumulih. (Tabel 2.7).

Tabel 4.7.
Jumlah Fasilitas Publik di Kota Prabumulih

No	Fasilitas Publik	Tahun 2000 (Sebelum Pemekaran Wilayah)	Tahun 2009 (Setelah Pemekaran Wilayah)
1	Kesehatan - Rumah Sakit - Puskesmas - Klinik	3 5 8	3 30 20
2	Pendidikan - SD - SMP - SMA	67 13 12	2882 2187 1330
3	Pasar - Inpres 1 - Inpres 2	673 74	1.191 0

4	Pelanggan Telpon	5,30 %	4700
5	Unit Usaha		
	- Industri makanan & minuman	106	455
	- Industri sandang	66	164
	- Industri pengolahan	13	156
	- Industri Logam	99	205
	- Industri bahan bangunan non logam	159	280
6	Tenaga listrik yang diproduksi	48.827.252 Kwh	84.711.476 Kwh

Sumber Data : Bappeda Kota Prabumulih

4.1.5. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Tingkat pengangguran di kota Prabumulih pada tahun 2007 mencapai 9,46 persen meningkat menjadi 10,42 persen pada tahun 2008. Angka ini pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 11,47.

Tingkat kesempatan kerja menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang tertampung dalam pasar kerja. Pada tahun 2007 tingkat kesempatan kerja sebesar 34,73, kemudian tahun 2008 menjadi 43,18 dan pada tahun 2009 sebesar 88,53. Kecenderungan untuk terus meningkat artinya dari 100 orang angkatan kerja di Prabumulih 86 orang yang telah bekerja. Ini berarti sebenarnya kesempatan kerja bertambah tetapi terjadi perubahan pada lapangan pekerjaan, seperti terdapat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Prabumulih Tahun 2007- 2009

Lapangan Pekerjaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sektor Primer (A)	44,48	39,88	48,47	48,47	44,49	38,71
Pertanian	39,67	34,73	43,18	43,18	39,28	38,71
Pertambangan	4,81	5,15	5,29	5,29	5,21	-
Sektor Sekunder (M)	13,28	12,29	8,64	8,64	7,61	3,26
Industri	6,43	6,37	3,05	3,05	2,97	3,26
Listik, Gas, Air	1,11	0,24	0,26	0,26	0,26	-
Bangunan	5,74	5,68	5,33	5,33	4,38	-

Sektor Tersier (S)	42,05	47,83	42,84	42,98	45,90	35,68
Perdagangan	28,63	23,70	18,77	18,91	19,55	24,35
Angkutan/Komunikasi	5,24	8,01	5,61	5,61	6,68	-
Keuangan	1,95	1,09	1,34	1,34	8,42	-
Jasa-jasa	6,43	15,03	17,12	17,12	13,25	-
Jumlah	100,00	100	100	100	100	100
N	50.823	50.805	52.787	52787	58.166	57.394

Sumber: BPS, Prabumulih Dalam Angka 2004-2010

Struktur ekonomi kota Prabumulih bercirikan ekonomi pertanian. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian relatif dominan, yaitu sebesar 43,18 persen. Pada tahun 2008 menurun menjadi 39,28 persen dan tahun 2009 menurun lagi menjadi 38,71 persen. Selanjutnya pada tahun 2007 tingkat pengangguran sebesar 9,46, kemudian tahun 2008 menjadi 10,42 dan pada tahun 2009 sebesar 8,53. Kecenderungan untuk terus meningkat terjadi seiring dengan menurunnya persentase orang yang bekerja di sektor primer pada tahun 2007 sebesar 43,18 persen, tahun 2008 menurun menjadi 39,28 persen dan tahun 2009 menurun lagi menjadi 38,71 persen. Demikian pula terjadi di sektor sekunder pada tahun 2008 orang yang bekerja sebanyak 13,93 persen, menurun menjadi 12,82 persen, dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 11,79 persen. Berbeda dengan sektor tersier yang mengalami peningkatan dari 41,07 persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 47,90 persen, kemudian pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 49,50 persen.

Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk miskin menurun dari 1,45 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 1,13 juta jiwa pada tahun 2008, atau berkurang sekitar 320 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin (P_0), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 20,99 persen pada tahun 2006 menjadi 15,68 persen pada tahun 2009. Jumlah penduduk miskin bervariasi antar kabupaten di Sumatera Selatan, dimana proporsi penduduk miskin pada tahun 2006 berkisar antara 9,23

persen (Palembang) hingga 35,52 persen (Musi Banyuasin). Distribusi penduduk tersebut pada tahun 2009 mengalami perubahan, dimana persentase terendah sebesar 9,95 dicapai oleh Kabupaten OKU Timur, sedangkan persentase terbesar, sebesar 22,76 dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin umumnya terjadi pada semua kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kota Prabumulih terus berkurang. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin mencapai 16,5 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 15,8 ribu jiwa, tahun 2005 mencapai 15,5 ribu jiwa dan tahun 2007 mencapai 10 ribu jiwa. Namun pada tahun 2008 meningkat menjadi 20,9 ribu jiwa, dan pada tahun 2009 berkurang menjadi 19,1 ribu jiwa. Jika pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim sebesar 9,33 persen, maka pada tahun 2007, 2008, dan 2009 masing-masing menjadi 15,39 persen dan 13,93 persen.

4.2. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai. Secara geografis terletak pada posisi antara 4° – 6° Lintang Selatan dan 104° – 106° Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 9.140,50 Km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir dan Prabumulih, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat.

Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim terbagi dalam 22 Kecamatan yang terdiri dari 321 desa/kelurahan, dengan rincian desa definitif sebanyak 282, desa persiapan sebanyak 23 dan kelurahan sebanyak 16. Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Lubai mempunyai luas wilayah paling besar, yaitu 10,8 persen dari total luas wilayah Kabupaten Muara Enim. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Kelekar dengan persentase luas sebesar 1,7 persen.

4.2.1. Kondisi Kependudukan

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2000 sebanyak 598.678 jiwa, dan pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim diperkirakan sebanyak 668.341 jiwa, atau dengan kata lain selama sembilan tahun terakhir jumlah penduduk bertambah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,45 persen per tahun. Perubahan jumlah penduduk selain sebagai konsekuensi logis dari kejadian kelahiran dan kematian, juga sangat dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk baik penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang pindah (migrasi keluar).

Dengan luas daerah 9.149,50 Km² tingkat kepadatan penduduk sebesar 73 jiwa per kilometer persegi, dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muara Enim yang mencapai 267 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Lawang Kidul 159 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Semende Darat Tengah dengan 26 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 1999 sampai dengan 2009. Hal ini tampak terlihat pada tahun 2002 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 3,91 persen. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya

pemekaran wilayah, dimana Kota Prabumulih dipisahkan dari Kabupaten Muara Enim semenjak tahun 2001 sehingga menarik minat penduduk asli yang awalnya berada di luar daerah kini bertransmigrasi kembali ke kotanya karena adanya perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Prabumulih yang membutuhkan potensi-potensi sumber daya manusia yang berkualitas, dan juga disebabkan tingkat angka kelahiran penduduk yang relatif tinggi di Kota Prabumulih. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang stabil yaitu 2,58%. Pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan yang rendah yaitu 0,52%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 1,85%. Kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2009 yaitu 1,13%. (Tabel 4.9)

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun di Kabupaten Muara Enim Tahun 1999 -2009

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1999	584.936	-
2000	596.678	2,01
2001	603.526	1,15
2002	608.413	0,1
2003	611.342	0,48
2004	629.623	2,99
2005	632.222	0,41
2006	643.924	1,85
2007	653.304	1,46
2008	660.906	1,16
2009	668.431	1,14

4.2.2. Perekonomian Daerah Kabupaten Muara Enim

Prestasi ekonomi suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, PDRB bukan hanya berguna untuk

menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan daerah lain.

Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan perekonomian yang bercorak agraris dengan dominan di sektor primer atau berbasis sumberdaya alam.

Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka PDRB selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunannya (*derived measures*) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (Dumairy, 1997 : 37).

Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan perekonomian yang bercorak agraris dengan dominan di sektor primer atau berbasis sumberdaya alam.

Tabel 4.10.
Pertumbuhan PDRB Dengan Migas Kabupaten Muara Enim
Periode 1994 – 2010

Tahun	Pertumbuhan (%)
1995	7,43
1996	8,21
1997	2,87
1998	0,12
1999	4,82
2000	6,05
2001	0,74
2002	2,71
2003	4,34
2004	3,67
2005	4,15
2006	5,44
2007	5,85
2008	5,67
2009	4,73
2010	5,34

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

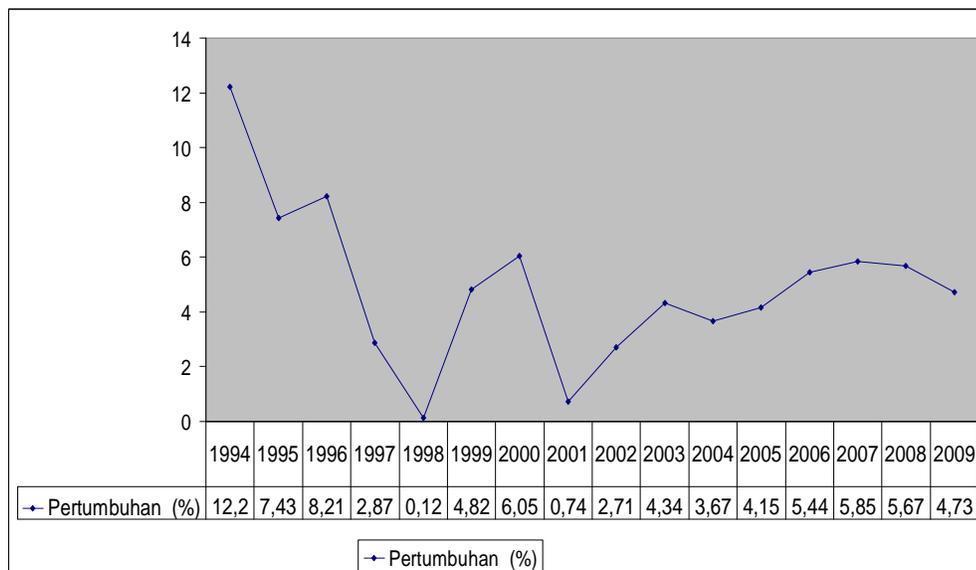
Keterangan : Tahun 1994 – 2000 berdasarkan harga konstan tahun 1993

Tahun 2001 – 2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dinyatakan dengan adanya kenaikan PDRB dari tahun ke tahun. Dengan demikian PDRB dapat juga dianggap sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi secara regional dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah senantiasa berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Hasilnya adalah ditandai dengan meningkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Masyarakat juga dituntut untuk turut berperan serta aktif mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.



Gambar 4.1. Pertumbuhan PDRB Dengan Migas Kabupaten Muara Enim
Periode 1994 – 2009

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

Keterangan : Tahun 1994 – 2000 berdasarkan harga konstan tahun 1993

Tahun 2001 – 2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000

Misalnya pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim hanya 0.12 persen karena pengaruh adanya krisis ekonomi di Indonesia yang mulai terjadi sejak Juli 1997 dan bahkan pada tahun 2001 perekonomian Kabupaten Muara Enim hanya mengalami peningkatan sebesar 0.74 persen. Hal ini karena pada tahun 2000 di Indonesia mulai dilaksanakannya otonomi daerah dan adanya perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2000.

Akibat gejolak ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat ikut mempengaruhi perekonomian di suatu daerah. Berdasarkan Tabel 4.11. pada tahun 2002 dan 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim telah mulai meningkat menjadi masing-masing sebesar 2.71, dan 4.34 persen sehingga sampai tahun 2007 pertumbuhannya sebesar 5.85 persen. Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim cenderung menurun, yaitu mencapai 5,67 persen. Begitupula dengan tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sebagai dampak terjadinya krisis global. Dampak dari krisis global menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, secara implisit berarti menurunnya permintaan dan daya beli dunia, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan penawaran dan menekan harga komoditas ekspor. Menurunnya permintaan dunia tersebut menyebabkan menurunnya ekspor Indonesia, termasuk komoditas pertanian di Kabupaten Muara Enim. Kemudian pada tahun 2010 terjadi kenaikan menjadi 5,34 persen.

Perkembangan PDRB Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada Tabel 4.11. Dari Tabel 4.11. dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian Kabupaten Muara Enim secara bervariasi terus mengalami pertumbuhan. Hanya kadang kala trend pertumbuhan ini tidak meningkat secara teratur, ini disebabkan berbagai macam gejolak ekonomi dan kebijakan yang kurang menguntungkan.

Sektor unggulan Kabupaten Muara Enim, meliputi sektor pertanian dan pertambangan (sektor primer). Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah 10,26 persen dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 8,39 dan turun kembali menjadi 6,08 persen pada tahun 2009. Sementara itu pada tahun 2007 sektor pertambangan dan penggalan tumbuh sebesar 3,80 persen dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,82 persen dan pada tahun 2009 melambat menjadi 3,25 persen. Kemudian pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 3,27 persen.

Sektor pertanian merupakan tumpuan Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena masih tersedianya lahan yang memadai serta layak untuk menjadi areal perkebunan, perikanan dan hortikultura.

Bila dilihat sumbangan antarsektor ekonomi tampak bahwa pada tahun 2007 sumbangan sektor pertambangan dan penggalan sekitar 56,43 persen dan tahun 2008 sektor pertambangan dan penggalan ini memberikan sumbangan sekitar 55,45 persen, tahun 2009 menjadi 54,66 persen, dan tahun 2010 menjadi 53,59 persen atau selama periode 2007 – 2010 rata-rata memberikan sumbangan sekitar 55,54 persen.

Sementara itu pada periode yang sama sektor pertanian memberikan sumbangan rata-rata sekitar 19,54 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode 2007–2010 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih sangat tergantung kepada sektor primer (sektor pertambangan dan penggalan dan sektor pertanian).

Dari sumbangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim bila dilihat perkembangannya selama kurun waktu 2007–2010, maka untuk sektor pertambangan dan penggalan secara persentase cenderung mengalami penurunan. Sementara sumbangan sektor pertanian relatif stabil. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalan ke sektor-sektor lainnya yaitu ke

sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kontribusi pertanian relatif kecil terhadap PDRB bertolak belakang dengan serapan tenaga kerja di sektor ini yang relatif tinggi. Sementara itu sektor pertambangan yang memiliki andil yang besar terhadap PDRB menyerap tenaga kerja yang relatif kecil, hal ini disebabkan sifat sektor pertambangan yang cenderung *capital intensive*. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan menimbulkan disparitas pendapatan antar sektor.

Tabel 4.11.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2001 – 2010

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	4.53	6.1	6.34	6.33	9.06	10.19	10,20	8,39	6,08	7,25
2	Pertambangan&Penggalian	-1.43	0.99	3.3	2.18	2.01	3.48	4,05	3,82	3,25	3,27
3	Industri Pengolahan	5.1	6.02	7.44	6.46	6.49	7.11	7,38	7,00	5,27	6,38
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	-1.41	1.63	2.38	2.62	3.7	4.98	5,15	5,26	5,21	6,45
5	Bangunan	6.26	6.73	6.74	6.84	6.92	7.42	8,14	8,31	8,56	9,29
6	Perdagangan, Hotel & Rest	5.48	5.53	5.82	6.32	6.39	7.61	8,37	7,53	5,98	8,86
7	Pengangkutan &Komunikasi	4.2	4.67	5.51	6.18	6.33	7.02	7,17	8,53	8,17	9,72
8	Bank dan Keuangan	3.6	4.92	4.47	4.86	5.02	5.28	5,34	7,73	7,84	8,12
9	Jasa-jasa	2.63	3.96	2.87	3.42	4.82	5.13	5,21	9,11	9,34	9,85
	PDRB Total	0.74	2.71	4.34	3.67	4.15	5.44	5,85	5,67	4,73	5,34

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

Jika dirinci menurut sektor maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2001 - 2010 berdasarkan harga konstan tahun dasar 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.11. Bila diamati lebih jauh, pertumbuhan sektor di Kabupaten Muara Enim cukup bervariasi. Ada beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan rata-rata relatif tinggi, seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, bank dan keuangan serta sektor jasa-jasa.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas pembangunan yang tinggi di Kabupaten Muara Enim, sehingga sektor-sektor ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam periode tahun 2001 - 2010 berdasarkan data tersebut diketahui sektor pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah 4,53 persen dan pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 6,10 persen. Pada tahun 2007 sektor pertanian tumbuh sebesar 10,26 persen, namun pada tahun 2009 cenderung menurun menjadi 6,08 persen, akibat krisis global. Namun pada tahun 2010 pertumbuhannya meningkat lagi menjadi 7,25 persen. Sementara itu pada tahun 2001 pertumbuhan sektor pertambangan mencapai minus, meningkat menjadi 4,05 persen pada tahun 2007 dan turun menjadi 3,27 persen pada tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode 2001 – 2010 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih sangat tergantung kepada sektor primer (sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian), dimana kontribusi kedua sektor tersebut sebesar 61,04 persen.

Tabel 4.12.

Distribusi PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 – 2010
Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rerata
1	Pertanian	15,62	16,14	16,45	16,87	17,66	18,45	19,22	19,72	19,97	20,33	14,15
2	Pertambangan&Penggalian	62,42	61,37	60,76	59,88	58,65	57,55	56,43	55,45	54,66	53,59	46,89
3	Industri Pengolahan	6,88	7,10	7,31	7,51	7,68	7,81	8,00	8,0	8,04	8,12	6,05
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,36
5	Bangunan	3,32	3,45	3,52	3,63	3,73	3,80	3,88	3,98	4,13	4,28	2,99
6	Perdagangan, Hotel & Rest	4,58	4,71	4,77	4,89	5,00	5,10	5,22	5,31	5,38	5,56	4,53
7	Pengangkutan&Komunikasi	1,25	1,28	1,29	1,32	13,50	1,37	1,39	1,43	1,48	1,54	2,30
8	Bank dan Keuangan	1,16	1,18	1,18	1,20	1,21	1,20	1,21	1,23	1,27	1,30	0,19
9	Jasa-jasa	4,36	4,37	4,31	4,30	4,33	4,31	4,34	4,48	4,68	4,88	4,00
	JUMLAH	100										

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

Dari sumbangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim bila dilihat perkembangannya selama kurun waktu 2001 – 2010, maka untuk sektor pertambangan dan penggalian secara persentase cenderung mengalami penurunan. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor-sektor lainnya yaitu ke sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dari gambaran perkembangan sumbangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Muara Enim dapat disimpulkan bahwa peranan sektor ekonomi di luar sektor pertambangan dan penggalian diduga masih akan tetap menandai perkembangan ekonomi di Kabupaten Muara Enim di tahun-tahun mendatang.

Mencermati lebih jauh andil masing-masing sektor selama kurun waktu 2001 - 2010, terlihat bahwa untuk sektor primer yang mendominasi terhadap pembentukan PDRB, andil rata-rata terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 46,89 persen, sisanya sebesar 14,15 persen berasal dari sektor pertanian. Sementara untuk sektor sekunder, andil yang terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 6,05 persen, dan sisanya berasal dari sektor bangunan dan dari sektor listrik, gas dan air minum masing-masing sebesar 3,65 persen dan 0.40 persen. Sedangkan untuk sektor tersier, andil terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata sebesar 4,97 persen, sementara sektor lainnya seperti sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan hanya memberi andil masing-masing sebesar 4,39 persen; 3,07 persen dan 1,20 persen (lihat Tabel 4.12).

Pendapatan perkapita Kabupaten Muara Enim mencerminkan secara umum pendapatan setiap penduduk dan lazim digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Muara Enim tersebut. Selama kurun waktu sebelas tahun terakhir, pendapatan per kapita Kabupaten Muara Enim terus meningkat. Hal ini terjadi baik dari sektor migas maupun sektor non migas setelah

pemekaran wilayah terlihat pada Tabel 4.13. Dengan migas pada tahun 2000 sebesar Rp. 9.667.374,00 menjadi Rp. 27.849.317,00 pada tahun 2010. Demikian pula pendapatan per per kapita tanpa migas pada tahun 2006 sebesar Rp 6.611.011,00 menjadi Rp. 7.644.520,00.

Tabel 4.13.
PDRB Per Kapita Kabupaten Muara Enim
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2000 – 2010 (Dengan Migas dan Tanpa Migas)

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dengan Migas	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
2000	9.667.374	6.611.011
2001	9.490.976	6.668.061
2002	9.6111.663	6.089.016
2003	9.907.497	6.961.463
2004	10.097.436	6.107.393
2005	10.346.438	6.264.996
2006	19.596.201	6.530.690
2007	22.602.389	6.883.938
2008	27.126.311	7.268.958
2009	26.814.463	7.637.512
2010	27.849.317	7.644.520

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim, data diolah

2.2.2. Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Angka pengangguran terbuka di Muara Enim pada tahun 2007 mencapai 7.89 persen, turun menjadi 6,37 pada tahun 2008. Angka ini pada tahun 2009 menurun menjadi 5,40 persen atau 17.271 orang. Angka pengangguran pada penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 5,71 persen pada penduduk laki-laki dan 4,93 persen untuk penduduk perempuan.

Pada tahun 2009 tingkat setengah pengangguran sebesar 47,42. Angka ini cenderung turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pada tahun 2008 besarnya

47,5 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 45,88. Artinya dari setiap 100 angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 47 sampai 45 orang mempunyai jam kerja yang relatif rendah (kurang dari 35 jam per minggu).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2009 sebesar 70,42, dimana untuk laki-laki sebesar 84,73 dan perempuan sebesar 55,64. Angka TPAK tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 mencapai 72,09, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 73,05. Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan. TPAK laki-laki bersifat universal, karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007 sebesar 58,20 dan pada tahun 2008 sebesar 58,70 serta tahun 2009 menurun menjadi 55,64.

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya yang dihadapi Kabupaten Muara Enim adalah tingginya angka pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Angka pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran pada penduduk yang tamat SLTA sebesar 11,06. Berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja berpendidikan SLTA sebanyak 11 sampai 12 orang diantaranya sedang menganggur. Pada tahun 2007 angka tersebut lebih besar lagi, yaitu sebesar 20,87, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 9,32.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran terdidik. Salah satunya adalah kemungkinan dengan pendidikan yang tinggi, mereka merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama

biasanya untuk bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal sektor sektor tersebut ketersediaannya terbatas, sehingga mereka terpaksa menganggur. Mereka yang termasuk kelompok penganggur terdidik diduga adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang tamat pendidikan sekolah.

Tabel 4.14.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007- 2009

Lapangan Pekerjaan	2007	2008	2009
Sektor Primer (A)	76,65	73,19	72,58
Pertanian	74,14	71,14	71,42
Pertambangan	2,51	2,05	1,16
Sektor Sekunder (M)	3,59	3,26	4,63
Industri	0,96	1,07	2,43
Listik, Gas, Air	0,8	0,96	0,57
Bangunan	1,83	1,23	1,63
Sektor Tersier (S)	19,76	23,55	22,79
Perdagangan	8,06	9,8	8,32
Angkutan/Komunikasi	4	3,4	4,66
Keuangan	0,33	0,91	0,3
Jasa-jasa	7,37	9,44	9,51
Jumlah	100.00	100	100
N	295.682	300.581	301.970

Sumber: BPS, diolah dari data Sakernas 2007-2009.

Tingkat kesempatan kerja menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang tertampung dalam pasar kerja. Pada tahun 2006 tingkat kesempatan kerja sebesar 91,56, kemudian tahun 2007 menjadi 92,11 dan pada tahun 2008 sebesar 93,63. Kecenderungan untuk terus meningkat terjadi juga pada tahun 2009, dimana angka kesempatan kerja menjadi 94,60. Artinya dari 100 orang angkatan kerja di Muara Enim 94 orang diantaranya telah bekerja.

Struktur ekonomi kabupaten Muara Enim bercirikan ekonomi pertanian. Pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian relatif dominan, yaitu sebesar 74,42 persen. Pada tahun 2007 menjadi 74,14 persen dan tahun 2008 menurun menjadi 71,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat menjadi 71,42 persen. Pada tahun 2006 tingkat kesempatan kerja sebesar 91,56, kemudian tahun 2007 menjadi 92,11 dan pada tahun 2008 sebesar 93,63. Kecenderungan untuk terus meningkat terjadi juga pada tahun 2009, dimana angka kesempatan kerja menjadi 94,60.

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim terus berkurang. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin mencapai 150,5 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 140,7 ribu jiwa, tahun 2007 mencapai 128,5 ribu jiwa dan tahun 2008 mencapai 118,4 ribu jiwa. Jika pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim sebesar 21,88 persen, maka pada tahun 2007, 2008, dan 2009 masing-masing menjadi 19,87 persen, 17,98 persen dan 15,96 persen.

4.3. Analisis dan Pembahasan

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut. Seperti halnya dengan Kota Prabumulih sebagai kota yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan analisis kinerja ekonomi daerah maka diketahui perubahan ke arah kemajuan yang signifikan pada Kota Prabumulih setelah dimekarkan. Kemudian dilakukan perbandingan dengan Kabupaten Muara Enim sebagai kota induk. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOB, daerah induk, maupun daerah sekitarnya.

Dari hasil Indeks Kinerja Ekonomi antara Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten Induk dengan Kota Prabumulih sebagai kota yang pemekaran menunjukkan bahwa perkembangan dalam kurun waktu 2000-2009. Kota yang baru

mengalami pemekaran menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun dilihat dari perhitungan indeks kinerja ekonomi daerah (IKE) adalah rata-rata kinerja ekonomi kota Prabumulih masih lebih rendah yaitu 1,55 bila dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim yaitu 1,72. Bila dilihat indeks kemiskinan di Kota Prabumulih ternyata menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 4.15. Kinerja Ekonomi atas PDRB dari Kabupaten/Kota Baru dan Induk Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Tahun 2009

Kabupaten/Kota	LPE 2001-2009	Rasio PDRB Terhadap PDRB Provinsi (R/N)	PDRB Perkapita (KAP)	Indeks Kemiskinan (PM)	Indeks Kinerja Ekonomi
Muara Enim	4,51	7,11	7.637.512	15,96	1.72
Prabumulih	5,21	2.12	6.867.301	13,39	1.55

Sumber : Data diolah

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah

Apabila kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi pada masa pemekaran semakin membaik maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, antara lain dicerminkan dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta rata-rata pengeluaran riil. Berdasarkan tiga kelompok indikator (kesehatan, pendidikan, dan pendapatan) kualitas hidup masyarakat tersebut secara akumulasi akan diperoleh nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Perubahan kualitas hidup yang terjadi antara daerah induk yaitu Kabupaten Muara Enim dengan daerah baru yaitu Kota Prabumulih dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Angka harapan hidup daerah induk (Kabupaten Muara Enim) tahun 2004 mencapai 65,8 tahun sedangkan daerah baru (Kota Prabumulih) telah mencapai 69,5 tahun. Pada tahun 2009 angka harapan hidup mengalami peningkatan, yakni daerah induk menjadi 67,47 tahun dan daerah baru menjadi 71,51 tahun.

Perubahan/kenaikan angka harapan hidup ini merupakan cerminan dari perubahan hidup masyarakat yang lebih sehat.

Angka melek huruf, tahun 2004 daerah induk sebesar 98,8 persen, sedangkan daerah baru hanya sebesar 97,5 persen. Kemudian pada tahun 2009, daerah baru meningkat menjadi 98,66 persen sedangkan daerah induk menjadi sebesar 98,81 persen.

Rata-rata lama sekolah daerah induk tahun 2004 adalah 7,2 tahun sedangkan di daerah baru 8,3 tahun. Kemudian tahun 2009 daerah induk meningkat menjadi 7,3 tahun seperti halnya dengan daerah baru yang meningkat menjadi 9 tahun. Hal ini menggambarkan keberhasilan daerah baru dalam memperhatikan masalah pendidikan sehingga masyarakat lebih lama dalam kegiatan belajarnya.

Rata-rata pengeluaran riil per kapita, tahun 2004 untuk daerah induk sebesar Rp. 595,5 sementara daerah baru Rp. 596,8 pada tahun yang sama. Kemudian pada 2009 rata-rata pengeluaran riil per kapita daerah induk meningkat menjadi Rp. 611,60,0 sedangkan daerah baru mengalami peningkatan relatif hampir sama menjadi sebesar Rp.610,06.

Berdasarkan empat indikator tersebut, tampak peningkatan pencapaian angka IPM yang berbeda. Pada tahun 2004 daerah baru memperoleh angka IPM relatif lebih tinggi 70,7 dibandingkan daerah induk 68,1. Sampai dengan tahun 2009 angka IPM relatif lebih tinggi 73,69 dibandingkan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah induk 70,38. Ini berarti menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi bagi daerah baru dibandingkan dengan peningkatan daerah induk. (Tabel 4.16)

Tabel 4.16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Dibanding Kota Prabumulih (Kota Baru) Tahun 2004-2009

IPM	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prabumulih	70,7	71,1	71,7	72,51	73,20	73,69
Muara Enim	68,1	68,7	69,14	69,42	69,91	70,38

Sumber data :BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan, 2004-2009

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis di atas adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 memberikan peluang bagi daerah baru untuk menggali kemampuannya untuk menjadi daerah yang mandiri dan berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Kota Prabumulih sebagai kota yang mengalami pemekaran dari kabupaten Muara Enim. Kota Prabumulih telah menunjukkan perubahan bila dilihat dari analisis menggunakan Indeks Ekonomi Daerah memang masih belum sebaik daerah induk (Kabupaten Muara Enim). Namun bila dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia ternyata Kota Prabumulih mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada daerah induk.

5.2. Saran

Dalam tulisan ini saran yang akan disampaikan penulis berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini adalah perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung aspek-aspek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan per kapita sebagai unsur-unsur yang penting dalam menilai kinerja perekonomian daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dwiyanto (Editor), 2003, *Laporan Penelitian. World Bank*, PSKEK-UGM, Yogyakarta. 2003.
- Arsyad, Lincoln, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta
- _____, 1993, *Pengantar Perencanaan Ekonomi*, Media Wedya, Mandala, Yogyakarta
- _____, 1999, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2000-2009, *Database Berbagai Edisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2002, *Studi Analisis Kemiskinan Tahun 2001* (Draft), Bappenas, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Development Programme, 2007, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*, Jakarta.
- Dumairy, 2008, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Hakim, Abdul, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, EKONOSIA, FE UII, Yogyakarta.
- HJ. deBlij, et all. In: *Geography, Regions and Concepts*, John Wiley and Son Inc. Canada, 1992.
- Ismail, Munawar, 1995, *Pertumbuhan dan Pemerataan : Analisa dan Bukti Empirik*, Prisma No.1 Tahun XXIV, Januari, Jakarta.
- Jinghan, M.L., 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit Pajar Interpretama, Jakarta

- Kuncoro, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, FE-UGM Yogyakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, FE-UGM Yogyakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2006. *Ekonomika Pembangunan*, Edisi ke 4. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, G, 2003, *Teori Makroekonomi*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Panji Indra. 2001. *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California, California.
- Panorama, Maya, 2002, *Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Sumatera Selatan*, Tesis (tidak dipublikasikan), PPS Universitas Sriwijaya.
- Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 2000, *Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sumatera Selatan 2000-2004*, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Palembang
- P3EM FE-Unsri, 2006. *Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Muara Enim*
 PP Nomor 129 tahun 2000
 PP Nomor 78 tahun 2007
 <http://www.slideshare.net/dadangsolihin>, *Otonomi Daerah dalam perspektif teori kebijakan dan praktek*
- Rahayu, S., Sondi, K., dan Adang, R. 2000. *Analisa Pemerataan Pendapatan Usaha ternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya)*. Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Richardson, W, 1973, *Regional Growth Theory*, Micmillan Press Ltd. London.
- Rosario G. M, Ruben G. M, 1999, *Regional Economic Growth and Convergence in the Philippines*, Philippine Institute for Development Studies, Philippina.

- Sjafrizal, 2002, *Teori Pertumbuhan Ekonomi regional dan Metode Analisis*, (Bahan Kuliah), Palembang.
- _____, 2002, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi*, (Bahan Kuliah), Medan 2002.
- Susanti, H., Moh.Iksan dan Widyanti, 2000, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryanto, Joko dan Soesilawati, Endang, 2008. *Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Empat Provinsi Pemekaran*
- Tambunan, Tulus, 2003, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Edisi Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, Michael, 2000, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2004, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 4.17. Angka Melek Huruf Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Dengan Kota Prabumulih (Kota Baru) Tahun 2000-2009

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)							
	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Muara Enim	-	-	-	98,80	98,80	98,80	98,80	98,81
Prabumulih	98,30	98,94	-	97,70	97,70	97,90	98,29	98,30

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia, BPS Sumatera Selatan, 2000-2009

Tabel 4.18. Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Dengan Kota Prabumulih (Kota Baru) Tahun 2000-2009

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)							
	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Muara Enim	-	-	-	66,60	66,90	67,09	67,28	67,47
Prabumulih	67,12	68,76	-	70,00	70,30	70,71	71,10	71,51

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia, BPS Sumatera Selatan, 2000-2009

Tabel 4.19. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Dengan Kota Prabumulih (Kota Baru) Tahun 2000-2009

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)							
	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Muara Enim	-	-	-	7,3	7,3	7,3	7,3	7,36
Prabumulih	7,35	8,74	-	8,3	8,4	8,88	8,88	9,08

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia, BPS Sumatera Selatan, 2000-2009

Tabel 4.20. Angka Pengeluaran per Kapita Riil Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Dengan Kota Prabumulih (Kota Baru) Tahun 2000-2009

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)							
	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Muara Enim	-	-	-	596,4	600,09	602,42	607,44	611,58
Prabumulih	-	-	-	597,1	601,45	603,81	608,80	611,50

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia, BPS Sumatera Selatan, 2004-2009

Curriculum Vitae Peneliti

Nama : Anna Yulianita,SE.,M.Si
 Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/16 Juli 1970
 Alamat : Jl. Demang Lebar Daun Komp. Kijang Mas D-2 Rt. 041
 Rw. 011 Palembang
 Telpon/HP : 08153803364
 e-mail : anna_fe@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

No	Jenjang	Nama Sekolah	Tahun Tamat
1	SD	SD Yaktapena II	1982
2	SMP	SMPN 16 Palembang	1985
3	SMA	Yaktapena I Palembang	1988
4	S1	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) FE UNSRI	1993
5	S2	Ekonomi Kawasan PPS UNSRI	2005

Karya Ilmiah

No	Judul Karya Ilmiah	Tahun	Sponsor	Publikasi
1	Penelitian mengenai pembiayaan perbankan di Sumatera Selatan untuk investasi dan modal kerja khususnya dalam mendorong ekspor non migas dan pengembangan usaha kecil guna mendukung pengembangan ekonomi daerah	2002	BI Palembang	Laporan Akhir
2	Studi identifikasi dan program peningkatan PAD Kota Palembang	2003	Bappeda Palembang	Laporan Akhir
3	Studi pemetaan potensi desa untuk pemberian bantuan desa di Kabupaten Banyuasin	2004	Pemkot Banyuasin	Laporan Akhir
4	Studi Kelayakan pendirian PD Pasar Palembang	2004	Bappeda Palembang	Laporan Akhir
5	Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin	2006	Dispenda Banyuasin	Laporan Akhir
6	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim	2006	Bappeda Muara Enim	Laporan Akhir
7	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pemerintah Kabupaten	2006	Bappeda Kabupaten	Laporan Akhir

	OKI		OKI	
8	Penyusunan Regulasi di Bidang Investasi di Kabupaten Musi Rawas	2006	Pemerintah Kabupaten MURA	Laporan Akhir
9	Pemetaan Persepsi Publik Terhadap Pola kepemimpinan dan Kinerja Pemerintah Kabupaten OKI	2006	Bappeda OKI	Laporan Akhir
10	Pengkajian Potensi Investasi dan Peluang Kerjasama Sektor Perdagangan di Kabupaten OKU	2006	BKPMD OKU	Laporan Akhir
11	Pengkajian dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sector perekonomian Kabupaten Lahat	2006	Bappeda Lahat	
12	Penyusunan Regulasi bidang investasi di OKU	2007	BKPMD OKU	Laporan Akhir
13	Penyusunan Indikator dan Pemetaan Rawan Pangan di Kabupaten Musi Rawas	2007	Pemkab MURA	Laporan Akhir
14	Survey BPR (Non Performing Loan / NPL), 2007	2007	GTZ ProFi dan BI	Laporan Akhir
15	Studi Pemekaran Kabupaten Muara Enim	2007	Bappeda Muara Enim	Laporan Akhir
16	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muara Enim	2007	Pemkab Muara Enim	Laporan Akhir
17	Studi Potensi dan Kapasitas Fiskal dalam Mendongkrak PAD Kabupaten MURA	2007	Pemkab Mura	Laporan
18	Pemetaan Rawan Pangan di Kabupaten Musi Rawas	2007	Pemkab Musi Rawas	Laporan Akhir
19	Masterplan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten OKI	2008	Pemkab OKI	Laporan Akhir
20	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim	2008	Pemkab Muara Enim	Laporan Akhir
21	Pemetaan Profil BPR di Sumsel dan Lampung	2008	BI	Laporan

Palembang, Agustus 2011

Anna Yulianita

NIP. 197007162008012015

